



**SEKRETRAIAT
DAERAH**



RENCANA KERJA 2025

Rencana kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Natuna



+123 456 7890



www.setda.natunakab.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman penting bagi setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Melalui dokumen ini, kami berharap dapat menjamin kesesuaian antara program kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran, serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah. Dengan demikian, setiap rencana dan program yang diusulkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam penyusunannya, kami telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi terkait dan masyarakat, untuk memastikan bahwa semua aspirasi dan kebutuhan terakomodasi dengan baik. Hal ini penting untuk menciptakan keterpaduan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2025.

Akhir kata, kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan Rencana Kerja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah, serta mencapai visi dan misi Kabupaten Natuna yang unggul dan sejahtera.

29 Juli 2024

Sekretaris Daerah,


BOY WIJANARKO VARIANTO, S.E.
NIP. 19770809 200212 1005

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Sebelum penetapan Renja setiap Perangkat Daerah harus menyusun ranwal dan rancangan Renja. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16, pasal 126 dan pasal 131 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan sesuai dengan tahapan.

Diantara tahapan penyusunan dokumen Renja yang harus dilalui oleh Perangkat Daerah adalah : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat

Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari periode RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026.

RENJA Sekretariat Daerah Kabupate Natuna Tahun 2025 akan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang mengusung tema *“Pemantapan Pembangunan Ekonomi Maritim Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Natuna Yang Unggul dan Sejahtera”*. Selain itu dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 memperhatikan isu strategis Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022-2026 yaitu : 1) Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi dan aspek Kebijakan, pengawasan dan proses evaluasi, 2).Kurangnya peahaman OPD dalam pelaksanaan delapan area perubahan, 3).Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman OPD terkait laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
- 5) Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, odefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8 Seagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Darah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);

17) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;

18) Peraturan Bupati Natuna nomor 1 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah Dan Badan Kabupaten Natuna;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud RENJA Sekretariat Daerah disusun sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Natuna dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan RENJA ini adalah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian

Renstra Sekretariat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing masing unit kerja dan atau laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun berkenaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah meliputi seluruh program dan kegiatan menyangkut realisasi capaian target kinerja kelauran keiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah 2022-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya

Evaluasi capaian kinerja 2023 dilakukan dengan maskud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil , kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana Pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbikan pelaksanaan rencana Pembangunan dimasa akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 berdsarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 2022-2026 , dapat dilihat pada table berikut :

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA											
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023											
PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah											
Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		
1	2	3	4	4A	5		6		7		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	Rp DPA
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Nilai LPPD	Angka	100	1,121,370,479	40	1,154,692,526	100	1,345,644,000	630,000,000
4.01.02.2.01.		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persen	90	1,121,370,479	40	1,154,692,526	90	1,345,644,000	630,000,000
4.01.02.2.01.01.		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	499,616,717	0	398,507,903	1	395,644,000	237,106,500
4.01.02.2.01.02.		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	290,342,619	0	305,864,140	1	600,000,000	152,843,500
4.01.02.2.01.03.		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	331,411,143	0	450,320,483	1	350,000,000	240,050,000
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	81	682,458,434	0	621,242,714	81	682,450,000	750,000,000

Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		
1	2	3	4	4A	5		6		7		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	Rp DPA
4.01.02.2.03.		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang di undangkan	Persen	72	682,458,434	0	621,242,714	72	682,450,000	750,000,000
4.01.02.2.03.01.		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	520	270,000,000	0	281,992,653	520	270,000,000	360,285,420
4.01.02.2.03.02.		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	3	212,458,434	0	251,206,619	3	212,450,000	292,669,720
4.01.02.2.03.03.		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	425	200,000,000	0	88,043,442	425	200,000,000	97,044,860
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	Indeks	65	984,073,182	88.89	497,508,798	65	1,180,887,600	962,678,750
4.01.01.2.13.		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tata kelolanya baik	Persen	100	586,773,182	83	285,768,520	100	775,311,600	558,663,620
4.01.01.2.13.01.		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	384,073,182	1	146,465,792	2	447,431,600	255,984,381
4.01.01.2.13.03.		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	150,000,000	1	44,311,814	1	209,204,000	168,937,909
4.01.01.2.13.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	52,700,000	1	94,990,914	1	118,676,000	133,741,330
4.01.01.2.13.		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Tata Laksananya Baik	Persen	100	397,300,000	0	211,740,278	100	405,576,000	404,015,130

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			
					5		6		7			
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA
4.01.01.2.13.02.		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	247,300,000	2	92,175,607	2	243,722,000	2	249,255,420
4.01.01.2.13.04.		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	150,000,000	1	119,564,671	1	161,854,000	1	154,759,710
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.03.		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi Daerah	Persen	3.13	523,559,924	0	277,201,172	3.13	523,556,000	3.13	570,000,000
4.01.03.2.01.		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	Persen	55	392,669,943	0	170,731,892	55	392,667,000	55	324,046,042
4.01.03.2.01.01.		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	130,889,981	0	70,478,507	1	130,889,000	1	130,000,000
4.01.03.2.01.02.		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	130,889,981	0	100,253,385	2	130,889,000	2	194,046,042
4.01.03.2.01.03.		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	130,889,981	0	0	1	130,889,000	1	0
4.01.03.2.04.		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	Persen	55	130,889,981	0	106,469,280	55	130,889,000	55	245,953,958
4.01.03.2.04.03.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	130,889,981	0	106,469,280	1	130,889,000	1	245,953,958
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	78.52	377,000,000	0	333,945,285	78.52	452,400,000	78.52	490,400,000

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			
					5		6		7			
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA
		KABUPATEN/KOTA										
4.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	85	377,000,000	0	333,945,285	85	452,400,000	85	490,400,000
4.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	300,000,000	0	186,932,364	1	250,000,000	1	230,400,000
4.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	27,000,000	2	147,012,921	2	152,400,000	2	260,000,000
4.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	3	0	3	50,000,000	3	0
4.01.03.		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	Persen	90	1,093,000,000	0	570,376,474	90	1,068,000,000	90	731,100,000
4.01.03.2.02.		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persen	90	1,093,000,000	0	570,376,474	90	1,068,000,000	90	731,100,000
4.01.03.2.02.02.		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	543,000,000	0	284,590,043	1	518,000,000	1	356,100,000
4.01.03.2.02.03.		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	550,000,000	0	285,786,431	12	550,000,000	12	375,000,000
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	3	1,444,596,000	3	1,188,555,000	3	1,444,596,000	3	1,756,698,516
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	1,444,596,000	30	1,188,555,000	100	1,444,596,000	100	1,756,698,516
4.01.02.2.02.02.		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan	Dokumen	1	1,444,596,000	1	1,188,555,000	1	1,444,596,000	1	1,756,698,516

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		
					5		6		7		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	Rp DPA
			Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	Persen	3	4,355,811,435	3	4,573,773,136	3	5,226,973,200	5,817,341,484
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	156,449,706	30	0	100	156,450,000	0
4.01.02.2.02.03.		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transtibum Linmas	Dokumen	1	156,449,706		0	1	156,450,000	0
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	4,199,361,729	30	4,573,773,136	100	5,070,523,200	5,817,341,484
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5	4,199,361,729	5	4,573,773,136	5	5,070,523,200	5,817,341,484
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi sekretariat yang sesuai SOP	Persen	85	35,503,714,410	88.89	42,620,971,391	85	34,186,530,781	50,009,668,282
4.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	19,605,410,410	100	18,570,106,801	1	14,137,083,251	19,699,441,893
4.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	150	19,605,410,410	90	18,570,106,801	150	14,137,083,251	19,699,441,893
4.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	45	7,500,000	158.33	73,637,891	45	75,775,000	81,174,364
4.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	6	7,500,000	83.33	73,637,891	6	75,775,000	81,174,364
4.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	1,217,544,000	100	4,317,800,265	75	2,064,668,000	5,319,949,589

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		
					5		6		7		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	Rp DPA
4.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	8.33	267,127,500	12	220,000,000	345,000,000
4.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	20,000,000	32	177,168,800	5	670,000,000	192,664,249
4.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	40	872,688,120	12	30,000,000	880,000,000
4.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	198,500,000	8	398,375,350	14	112,500,000	631,257,000
4.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	66.67	0	12	20,000,000	0
4.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	899,044,000	51.2	2,602,440,495	100	1,012,168,000	3,271,028,340
4.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	80	1,725,000,000	81.25	1,582,243,904	80	1,519,930,000	1,988,813,000
4.01.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	1,500,000,000	10	39,024,000	4	468,830,000	45,000,000
4.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	396,695,000	5	129,700,000	507,980,000
4.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	653,376,000	5	226,700,000	692,500,000
4.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	184,185,000	5	300,000,000	256,000,000
4.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75,000,000	3	308,963,904	1	394,700,000	487,333,000
4.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	5,687,140,000	80	5,498,919,594	100	5,582,967,530	6,189,099,740
4.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	50,000,000	4860	49,944,000	12	25,000,000	60,000,000
4.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	85,000,000	5	1,342,166,783	12	1,765,000,000	1,968,646,000

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			
					5		6		7			
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA
4.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5,552,140,000	953.53	4,106,808,811	12	3,792,967,530	12	4,160,453,740
4.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	810,000,000	100	5,184,054,331	70	4,211,000,000	70	6,323,983,000
4.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39	510,000,000	161.9	3,633,762,807	39	3,371,000,000	39	4,593,649,000
4.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	275,000,000	100	924,712,524	6	610,000,000	6	1,075,350,000
4.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	25,000,000	75	625,579,000	4	230,000,000	4	654,984,000
4.01.01.2.11.		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan	Persen	100	6,451,120,000	100	7,394,208,605	100	6,595,107,000	100	10,407,206,696
4.01.01.2.11.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	1,423,500,000	600	1,318,382,156	2	1,105,820,000	2	2,359,899,213
4.01.01.2.11.03.		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	100,000,000	100	0	2	80,000,000	2	1,000,000
4.01.01.2.11.04.		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	4,927,620,000	600	6,075,826,449	2	5,409,287,000	2	8,046,307,483
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	2,194,087,972	0	567,151,725	100	2,194,086,000	100	1,161,000,000
4.01.01.2.14.		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokol Terencana yang terfasilitasi	Persen	85	2,194,087,972	0	567,151,725	85	2,194,086,000	85	1,161,000,000
4.01.01.2.14.01.		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	Laporan	12	1,029,508,911	0	315,502,488	12	1,029,508,000	12	555,614,060

[illegible]

Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			
1	2	3	4	4A	5		6		7			
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	Persen	90	544,770,593	90	798,250,900	90	544,754,000	90	450,000,000
4.01.02.2.04.		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Yang Disepakati	Persen	90	544,770,593	90	798,250,900	90	544,754,000	90	450,000,000
4.01.02.2.04.01.		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10	354,100,890	19	523,641,065	10	354,100,000	10	283,467,250
4.01.02.2.04.02.		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	81,715,574	0	81,715,574	1	81,700,000	1	32,250,040
4.01.02.2.04.03.		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	108,954,129	3	192,894,261	1	108,954,000	1	134,282,710

Tabel 1. Capaian Indikator Program Tahun Sebelumnya (2023)

Program	Indikator	Target	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kelembagaan	65	75
	Nilai Laporan LKJIP	78.52	63.00
	Persentase Pelayanan Kedinasan kepala Daerah	100	100
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	85	85
Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	53	63
	Persentase Realiasi Pelaksanaan Pembangunan	90	90.89
	Tingkat Inflasi Daerah	3.13	NA
Program Pemerintah dan Kesejahteraan	Persentase Pemenuhan Koordinasian Bidang Keagamaan	90	75
	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA	65	95
	Indeks Kualitas Kebijakan	81	68.22
	Persentase Kerjasama yang ditindak lanjuti	90	70
	Peningkatan Nilai LPPD	3.03	2.09

Dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023, terdapat tiga (3) pogram dengan dua belas (12) indikator program. Dari dua belas indikator program enam diantaranya mencapai target, dan enam indiaktor lainnya belum mencapai target (lihat table 1).

Tabel 2. Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Indikator	Target 2023 (%)	Capaian (%)
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evluasi Kinerja PD	persentase realisasi kinerja perangkat daerah	85	84
2	Kegiatan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah	100	100
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	45	85
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	75
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase peningkatan BMD	80	80
6	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100	75
7	Pemeliharaan BMD penunjang ursan pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarna prasarana	70	75
8	Administrasi Keuangan dan Operasional KDH-WKDH	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan operasional KDH-WKDH yang sesuai dengan kebutuhan	100	75
9	Kegiatan Penataan Organisasi	persentase perangkat daerah yang tata kelola baik	100	100
		persentase perangkat daerah yang tata laksana baik	100	100

10	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokoler terencana yang difasilitasi	85	80
11	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat	100	100
12	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Yang Diundangkan	81	71
13	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama yang di sepakati	90	100
14	Kegiatan Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	90	33
15	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	55	50
16	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	55	52
17	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	90	93.7
18	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	3.6	53.74
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	14	23

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis , disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

SASARAN	INDIKATOR	Target Renstra			Realisasi			Rata-rata Capaian
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	%
Meningkatnya pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah	Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	56%	95%	95%	94.82%	96.16%	96.55%	95.84%
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Daerah	75.00	76.15	76.90	73.84	73.98	74.31	74.04
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai EPPD dalam LPPD	3.32	3.33	3.34	3.31	2.09	3.17	2.86
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	3.47	3.48	3.41	3.71	3.5	3.54

Realisasi masing masing Indikator Sasaran diperoleh dengan memperhitungkan sebagai berikut :

a. Realisasi Indikator Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA

Realisasi diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan bantuan dana pembinaan dan operasional oleh Pemerintah Daerah pada rumah ibadah dan TPQ/TPA/MDA. Metode pengukuran kinerja yaitu melalui formulasi perbandingan rumah ibadah atau TPQ/TPA/MDA yang aktif dan memiliki kepengurusan serta mendapatkan bantuan pembinaan dan dana operasional dengan jumlah rumah ibadah TPQ/TPA/MDA yang ada di Kabupaten Natuna.

Berdasarkan data tahun 2022 jumlah rumah ibadah 285 mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 311 rumah ibadah (masjid, gereja, surau). Kenaikan peningkatan jumlah rumah ibadah mencapai 9%. Sementara jumlah TPQ/TPA/MDA justru mengalami penurunan 154 di tahun 2022 menurun di tahun 2023 menjadi 138 TPQ/TPA/MDA menurun sekitar 10.4%.

b. Nilai SAKIP Daerah

Target 76.15 realisasi 73.98 belum mencapai target. SAKIP dinilai dari 4 Komponen, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi Akuntabilitas kinerja. Target belum tercapai disebabkan permasalahan dan kendala sebagaimana yang menjadi rekomendasi dari MENPANRB yaitu :

1. Dokumen perencanaan yang belum berorientasi hasil atau dampak langsung kepada masyarakat dan indikator kinerja yang belum memenuhi

2. Kualitas penetapan kinerja belum sempurna khususnya dalam memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif setiap tahun dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik.
3. Belum memanfaatkan secara optimal tool E-Kejap dalam memantau capaian kinerja serta tingkat kepatuhan pengisiannya masih rendah sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara real time
4. Belum memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi dan target kinerja kedepan.
5. Kualitas laporan kinerja yang belum sempurna baik itu pada laporan kinerja tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah.
6. Belum memanfaatkan informasi kinerja dalam LAKIP Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas.

Tindak lanjut atas permasalahan dan kendala diatas dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja realisasi indikator adalah mengkoordinasikan bersama satkeholder dan jajaran pimpinan sekretariat daerah terkait rekomendasi evaluasi SAKIP. Kemudian menyusun langkah strategis pelaksanaan rekomendasi sesuai tanggungjawab dan wewenang unit kerja. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut, dan mereview hasil pelaksanaan kinerja apakah sudah sesuai rencana atau masih ada kendala.

c. Nilai EPPD

Realisasi indikator EPPD tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Natuna tahun 2020. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variable yaitu Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM). Target EPPD tahun 2023 adalah kategori sangat tinggi (skala 3-4). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian diperoleh nilai indeks EPPD adalah 2,09. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna masuk kategori berprestasi sedang (skala 1-2) dan belum tercapai target.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EPPD adalah sebagai berikut :

- Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan laporan lainnya menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampi memenuhi kualitas yang seharusnya;
- Adanya data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari Perangkat Daerah menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.
- Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta.
- Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan kertas Kerja Evaluator sehingga PD sulit menentukan data mana yang dipakai;

- Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung yang akan dibena;
- Capaian kinerja yang disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi.

d. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Nilai ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Target indikator ini pada tahun 2023 adalah 3.47 tercapai 3.71. Capaian nilai tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik dengan capaian 106, %.

Faktor Pendukung atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan public sesuai dengan standar pelayanan publik;
- Komitmen dari stakeholder dan ASN dalam memberikan pelayanan public yang prima;
- Adanya dukungan sumberdaya anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan memepertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah, telaahan terhadap visi misi Kepala Daeah Kabupaten Natuna, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan Pembangunan di Kabupaten Natuna yaitu :

a) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah masih belum optimal dan perlu mendapat perhatian serius, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi public atas hasil Pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/ asset pemerintah daerah, kurang nya kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, kurang intensnya pelaskanaan monitoring dan evaluasi, kurang optimalnya penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan pengadaan barang dan jasa.

b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Masyarakat Kabupaten Natuna diantaranya dilaksanakan melalui pembinaan mental keagamaan. Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai nilai agama yang terwujud dalam prilaku bermoral.

c) Sinergitas dan koordinasi perumusn kebijakan kesejahteraan Masyarakat dan sosial

Kesejahteraan Masyarakat tidak terlepas dari isu kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan ditandai dengan naiknya angka kemiskinan Kabupaten Natuna. Pengangguran di Kabupaten Natuna mengalami sedikit penurunan. Angka kemiskinan dan Pengangguran yang ada menyebabkan pemerataan kesejahteraan / distribusi pendapatan dan ketimpangan cukup tinggi, hal ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan sinergitas perumusan kebijakan dalam penanganan dan peningkatan masalah kesejahteraan sosial.

d) Sinergitas dan koordinasi perumusan penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada potensi sumber daya lokal

Isu penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada peningkatan potensi sumber daya lokal menjadi hal yang paling penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Penguatan potensi ini dilakukan melalui pengembangan usaha mikor kecil dan menengah agar mampu bertahan dan bertumbuh sebagai penopang perekonomian daerah.

Belum optimalnya perumusan kebijakan penguatan perekonomian menjadi salah satu factor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan Kabupaten lain yang ada di Propinsi Kepulauan Riau.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kebijakan pelayanan publik dan meningkatkan kebijakan bina mental spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Rancangan Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada table lampiran.

2.4. Penelaahan Terhadap Usulan Partisipatif Masyarakat

Dalam proses pembangunan daerah diperlukan partisipatif dari masyarakat sebagai bentuk keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan. Proses partisipatif ini dilakukan dalam bentuk kegiatan musyawarah rencana pembangunan (msrenbang) ditingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Dalam pelaksanaan proses Musrenbang di tingkat Kecamatan, terdapat beberapa usulan kegiatan dari Masyarakat/desa ke Sekretariat Daerah diantara ditujukan ke Bagian Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Tata Pemerintahan. Untuk lebih jelas disajikan pada table dibawah ini.

Tabel 4. Usulan Program dan kegiatan Dari Masyarakat

No	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Volume	Catatan
I	Pokok Pokok Pikiran DPRD					
A	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
1	Kegiatan Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
	1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Pengadaan Karpet Rumah Ibadah	Masjid Al Huda Desa Cemaga Selatan	1 Paket	Pokir DPRD / Diteruskan ke RKPD
			Pengadaan Karpet Rumah Ibadah	Masjid An Nur Desa Cemaga Selatan	1 Paket	Pokir DPRD / Diteruskan ke RKPD
II	Aspirasi Masyarakat (Musrenbang)					
A	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
1	Kegiatan Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
	1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Pengadaan Alquran untuk TPQ dan rumah Quran	Desa Kelanga	1 Paket	Usulan Kecamatan
2	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan					
	2.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Kesejahteraan Kader Posyandu Kelurahan dengan Pemberian Insentif sebesar Rp. 350.000,-/bulan	Kelurahan Ranai	Paket	Usulan Kecamatan/ditolak tidak sesuai tupoksi Bagian Tapem
	2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Honor Kader Posyandu (Kader Posyandu Beringin Dan Bunda Pertiwi)	Kelurahan Ranai Dara	Paket	Usulan Kecamatan/ditolak tidak sesuai tupoksi Bagian Tapem
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Panggung Tenda	Desa Kelanga	Unit	Usulan Kecamatan/ditolak tidak sesuai kewenangan bagian umum

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kualitas rencana Pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antara pusat, provinsi dan Kabupaten serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan Pembangunan daerah.

Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan setiap misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Lebih lanjut, sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna yang tertuang dalam dokumen Renstra juga harus sinergis mendukung pencapaian sasaran pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, sinergi perencanaan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan satu tahun. Berikut ini adalah keterhubungan dan keselarasan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi.

Tabel 5. Keselarasan Sasaran Renstra Kemendagri, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024	Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepri 2021-2026	Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 2022-2026
S.7. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional dan inovatif	S.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	S.2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah S.3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
S.10. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	T.2. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	T.2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

3.2. Telaahan Terhadap RKPD Kabupaten Natuna 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2025 berfokus pada tiga hal yaitu :

- 1) Pembangunan ekonomi daerah. Keterkaitan dengan fungsi Sekretariat Daerah adalah perumusan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Selain itu juga mengkoordinasi perangkat daerah terkait dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah
- 2) Penguatan tata kelola pemerintahan. Keterkaitan dengan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki wewenang penuh dan tanggungjawab dalam menjamin terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik. Merumuskan kebijakan upaya peningkatan kinerja, serta kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Keterkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu perumusan kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan SDM melalui peningkatan bina mental Masyarakat, menjalin Kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas SDM pegawai dan Masyarakat.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif mendukung mewujudkan misi 1. **Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan sasaran Meningkatnya

pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yakni. Dan misi 6 ***Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas*** dengan sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Demi terwujudnya visi misi Kabupaten Natuna RPJMD tahun 2021-2026 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna menetapkan 2 (dua) tujuan yang merupakan turunan dari sasaran misi pada RPJMD seperti yang terlihat pada gambar 1 (satu).

Tabel 1. Tujuan Resntra Sekretariat Daerah



Tujuan Pertama (T.1) yaitu Meningkatnya pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat. Tujuan ini mendukung visi misi Kepala Daerah, misi pertama (1) *Akselarasai peningkatan kualitas sumber daya manusia*. Tujuan pertama (T.1) Sekretariat Daerah ini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai agama, moral dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Sasaran (S.1) yang ingin dicapai pada Tujuan ini adalah

Meningkatnya pembinaan terhadap Lembaga keagamaan (TPQ/TPA/MDA) di Daerah .

Tujuan kedua (T.2) yaitu Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Tujuan ini mendukung visi misi Kepala Daerah pada misi enam (6) Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun sasaran (S.2) yang ingin dicapai dari tujuan (2) Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan transparan. Yang menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran ini diukur dari tiga indikator yakni : 1). Dinilai dari nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 2). Dinilai dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam LPPD, 3). Dinilai dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1. Tujuan Sasaran dan Indikator Rencana Kerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
Meningkatnya pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga keagamaan (TPQ/TPA/MDA) di Daerah	1. Persentase Pembinaan Lembaga Keagamaan (TPQ/TPA/MDA)	95%
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP 2. Nilai LPPD 3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 3.34 3.80

indikator sasaran mengalami perubahan target seperti indikator 1 dari 65% menjadi 95%. Hal ini disebabkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pada tahun 2022-2023 yang mencapai diatas target, sehingga dengan kondisi eksisting kinerja yang cukup bagus maka diperlukan perubahan target menyesuaikan hasil capaian kinerja sebelumnya. Kemudian indikator yang

juga mengalami perubahan target adalah indikator (4) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 3.49 target berubah menjadi 3.80. Hal ini juga sama dengan indikator sebelumnya bahwa hasil capaian tahun sebelumnya sudah melebihi target sehingga diperlukan penyesuaian target berdasarkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas terkait perubahan target dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator	Target 2025 sebelum perubahan	Target 2025 setelah perubahan
Persentase Pembinaan Lembaga Keagamaan (TPQ/TPA/MDA)	65%	95%
Nilai SAKIP Kabupaten	77.00	77.00
Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.34	3.34
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.49	3.80

3.3. Kebijakan Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan kebijakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Sesuai dengan arah Pembangunan RKPD tahun 2025, maka pada tahun 2025 arah kebijakan program kegiatan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu melalui upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan yang berbasis digital, transparansi pengelolaan keuangan, peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran dll.

Diantara bentuk strategi nya adalah Fasilitasi peningkatan pelayanan publik bagi entitas yang memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat. Kemudian peningkatan kualitas kebijakan (indeks kualitas kebijakan), peningkatan tatalaksana kelembagaan (indeks kelembagaan), optimalisasi aplikasi SISMONKAB dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan, Peningkatan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (indeks PBJ), Peningkatan layanan administrasi kepegawaian.

2. Peningkatan Ekonomi Daerah, yaitu melalui optimalisasi kebijakan perekonomian dan Pembangunan yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Mendorong penyerapan anggaran APBD seoptimal mungkin dalam bentuk percepatan belanja daerah fisik maupun non fisik. Meretorasi manajemen BUMD sehingga bisa bertumbuh dan memberikan profit bagi daerah, dan pengendalian inflasi melalui pegelaran pasar murah, memperluas pasar produk UMKM lokal melalui kebijakan Kerjasama antar daerah dan pihak swasta.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia, ada dua yang menjadi sasaran yaitu SDM Pemuda sebagai asset daerah dan SDM Kepegawaian. SDM Kepemudaan melalui peningkatan penddidikan iman dan taqwa serta Pendidikan tinggi. strateginya yang akan ditempuh untuk

peningkatan kualitas SDM yaitu penguatan IMTAQ kalangan remaja melalui kegiatan Bina Mental Spritual. Kemudian beasiswa bagi anak-anak daerah untuk bisa menempuh Pendidikan tinggi di Universitas melalui program Kerjasama daerah dengan Institusi Pendidikan, Sementara SDM kepegawaian melalui peningkatan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan diklat fungsional, bimbingan teknis sesuai kebutuhan yang strategis.

Berikut adalah target kinerja program Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6. Indikator Sasaran Program Sekretariat Daerah

Program	Sasaran Program	Indikator	Target 2025
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya penyelenggaraan Kebijakan Pembinaan Mental Spritual	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	96%
	Meingkatkan Penyelenggaraan Kebijakan Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah yang terpenuhi Indikator LPPD	100%
		Indeks Kualitas Kebijakan	70
		Kerjasama yang ditindaklanjuti	90%
Program Perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan dan kebijakan Perekonomian	Nilai Indeks PBJ	78
		Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90%
		Tingkat Inflasi Daerah	2.85
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kelembagaan	70
		Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	77
	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan dan layanan pimpinan	Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	90%
		Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	100%

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Program

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya :

- 1) Mempedomani RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 serta Resntra Sekretariat Daerah 2022-2026.
- 2) Mendukung pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi.
- 3) Keserasian dan keterpaduan Pembangunan baik perencanaan Pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka Pembangunan daerah.
- 4) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan Pembangunan daerah
- 5) Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu isu strategis Sekretariat Daerah
- 6) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efiseinsi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 3 program dan 18 kegiatan dan 45 Sub kegiatan
2. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2025 adalah sebesar Rp. **65,162,892,798** yang bersumber dari APBD Kabupaten. Adapun rekapitulasi program kegiatan dan pendanaan tahun 2023 disajikan dalam tabel pada lampiran.

Matrik Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2025 dan
Perkiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten
Natuna

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JEN/S PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03	Sekretariat Daerah								7,057,875,885	7,025,208,845		
03.06	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								7,057,875,885	7,025,208,845		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								7,057,875,885	7,025,208,845		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								7,057,875,885	7,025,208,845		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat		PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	3			1,787,505,835	1,787,505,835		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	1,787,505,835	1,787,505,835		
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	1,787,505,835	1,787,505,835		Sekretariat Daerah
	Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga (PSDKU)			Kabupaten Natuna				2	500,000,000	500,000,000		
	Kegiatan dan Operasional Islamic Center NGU			Kecamatan Bunguran Timur				1	988,074,835	988,074,835		
	Kegiatan Safari Ramadhan Pemkab			Kabupaten Natuna				1	249,431,000	249,431,000		
	Pengadaan AC			Kecamatan Bunguran Timur				2	22,000,000	22,000,000		
	Pengadaan Gerobak Dorong			Kecamatan Bunguran Timur				1	8,000,000	8,000,000		
	Pengadaan Kipas Angin Kamar			Kecamatan Bunguran Timur				2	21,000,000	21,000,000		
	Pengadaan Mesin Potong Rumput			Kecamatan Bunguran Timur				1	8,000,000	8,000,000		
	Pengadaan Printer			Kecamatan Bunguran Timur				1	8,000,000	8,000,000		
	Pengadaan Tangga			Kecamatan Bunguran Timur				1	7,000,000	7,000,000		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat		PERSENTASE PENINGKATAN PEMBINAAN TPQ/TPA/MDA	3			5,270,170,250	5,237,703,210		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	50,000,000	0		

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 01 02 2 02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	50,000,000	0		Sekretariat Daerah
	BANTUAN AL- QURAN SETIAP GURU- GURU NGAJI AL- QURAN RUMAHAN DAN TPA DESA KELANGA			Desa Kelanga				10	50,000,000	0		
4 01 02 2 02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	5,220,170,250	5,237,703,210		
4 01 02 2 02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	5,220,170,250	5,237,703,210		Sekretariat Daerah
	Bantuan Hibah Kelembagaan, Rumah Ibadahm TPQ			Kabupaten Natuna				1	1,000,000,000	1,000,000,000		
	Kegiatan PHBI			Kabupaten Natuna				1	250,000,000	250,000,000		
	Lanjutan Pembanguna Gereja HKBP			Kecamatan Bunguran Timur				1	500,000,000	300,000,000		
	MTQ Kabupaten			Kabupaten Natuna				1	1,000,000,000	1,000,000,000		
	MTQH Provinsi			Kabupaten Natuna				1	682,467,049	1,000,000,000		
	Pelatihan Imam dan Khatib			Kabupaten Natuna				1	370,703,201	370,703,210		
	Penambahan Sarana/Prasarana Masjid Al- Gaum Desa Binjai			Desa Binjai				1	100,000,000	100,000,000		
	Pengadaan Karpet Masjid/surau			Kabupaten Natuna				1	450,000,000	450,000,000		
	Pengadaan Kipas Angin Dinding			Kecamatan Bunguran Timur				1	21,000,000	21,000,000		
	Pengadaan Kipas Angin Dinding			Kecamatan Bunguran Timur				1	21,000,000	21,000,000		
	Pengadaan kipas angin masjid (model embun)			Kecamatan Bunguran Timur				1	80,000,000	80,000,000		
	Pengadaan Lampu Hias Taman Kawasan Masjid Agung Natuna			Kecamatan Bunguran Timur				1	100,000,000	0		
	Pengadaan Lampu LED Tulisan berjalan			Kecamatan Bunguran Timur				1	30,000,000	30,000,000		
	Pengadaan Scofolding			Kecamatan Bunguran Timur				1	40,000,000	40,000,000		
	Pengadaan Sound Sistem			Kabupaten Natuna				1	50,000,000	50,000,000		
	Pengadaan Vacum Cleaner			Kecamatan Bunguran Timur				1	25,000,000	25,000,000		
	Penyelenggaraan Haji, Manasik pembermagkatan dan pemulangan			Kecamatan Bunguran Timur				1	500,000,000	500,000,000		
JUMLAH									7,057,675,885	7,025,208,845		

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03.	Sekretariat Daerah								1,841,750,000	1,819,750,000		
03.05.	<u>BAGIAN ADMINISTRASI</u> <u>PEMBANGUNAN</u>								1,841,750,000	1,819,750,000		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								1,841,750,000	1,819,750,000		
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								1,841,750,000	1,819,750,000		
4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		NILAI LAPORAN LKJIP	78.65			413,000,000	391,000,000		
4.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	90	413,000,000	391,000,000		
4.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	335,000,000	335,000,000		Sekretariat Daerah
	Pengadaan Komputer PC			Kecamatan Bunguran Timur				1	35,000,000	35,000,000		
	Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kecamatan Bunguran Timur				2	300,000,000	300,000,000		
4.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	3	78,000,000	56,000,000		Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Belanja Modal Display Monitor LCD			Kecamatan Bunguran Timur				1	20,000,000	0		
	Belanja Modal Mesin Scanner			Kecamatan Bunguran Timur				1	8,000,000	6,000,000		
	Pengoordinasian Pelaksanaan evaluasi kinerja dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah			Kecamatan Bunguran Timur				1	50,000,000	50,000,000		
4 01 03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE REALISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	90			1,428,750,000	1,428,750,000		
4 01 03.2 02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	90	1,428,750,000	1,428,750,000		
4 01 03.2 02.02.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	629,000,000	629,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				3	17,000,000	17,000,000		
	Belanja Modal Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				3	12,000,000	12,000,000		
	Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah			Kabupaten Natuna				1	600,000,000	600,000,000		
4 01 03.2 02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	799,750,000	799,750,000		Sekretariat Daerah
	Pengadaan Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				1	25,000,000	25,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03.	Sekretariat Daerah								840,000,000	741,789,758		
03.04.	<u>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</u>								840,000,000	741,789,758		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								840,000,000	741,789,758		
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								840,000,000	741,789,758		
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		TINGKAT INFLASI DAERAH	2,94			840,000,000	741,789,758		
4.01.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						Persentase Kebijakan Perekonomian	65	565,000,000	506,193,172		
4.01.03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	245,000,000	270,596,586		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Printer			Kecamatan Bunguran Timur				1	15,000,000	15,000,000		
	Belanja Modal Smart TV Display			Kecamatan Bunguran Timur				1	20,000,000	20,000,000		
	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Kabupaten Natuna				1	210,000,000	235,596,586		
4.01.03.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	2	320,000,000	235,596,586		Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Distribusi Perekonomian					
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Kabupaten Natuna				1	320,000,000	235,596,586		
4.01.03.2.04.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	65	275,000,000	235,596,586		
4.01.03.2.04.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	275,000,000	235,596,586		Sekretariat Daerah
	Pengkordinasian dan fasilitasi pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			Kabupaten Natuna				1	275,000,000	235,596,586		
JUMLAH									840,000,000	741,789,758		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03.	Sekretariat Daerah								751,000,000	724,000,000		
03.02.	<u>BAGIAN HUKUM</u>								751,000,000	724,000,000		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								751,000,000	724,000,000		
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								751,000,000	724,000,000		
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN	86			751,000,000	724,000,000		
4.01.02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						Persentase Produk hukum yang di undangan	74	751,000,000	724,000,000		
4.01.02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	540	357,000,000	350,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Mesin Scanner			Kecamatan Bunguran Timur				1	7,000,000	0		
	Perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan lainnya.			Kabupaten Natuna				500	350,000,000	350,000,000		
4.01.02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	250,000,000	250,000,000		Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Pelayanan bantuan hukum, Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Hukum			Kabupaten Natuna				2	250,000,000	250,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 01 02 2 03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	435	144,000,000	124,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Laptop			Kabupaten Natuna				1	40,000,000	20,000,000		
	Belanja Modal Printer			Kecamatan Bunguran Timur				1	4,000,000	4,000,000		
	Melakukan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah			Kecamatan Bunguran Timur				400	100,000,000	100,000,000		
JUMLAH									751,000,000	724,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03	Sekretariat Daerah								572,001,000	572,000,635		
03.10	BAGIAN KERJASAMA								572,001,000	572,000,635		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								572,001,000	572,000,635		
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								572,001,000	572,000,635		
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE KERJASAMA YANG DITINDAKLANJUTI	90			572,001,000	572,000,635		
4.01.02.2.04.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						Persentase Kerjasama Yang Disepakati	90	572,001,000	572,000,635		
4.01.02.2.04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12	374,217,651	457,600,581		Sekretariat Daerah
	Fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Fasilitasi kerja sama dalam negeri			Kabupaten Natuna				10	374,217,651	457,600,581		
4.01.02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	197,783,349	114,400,054		Sekretariat Daerah
	Pemantauan dan evaluasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri			Kabupaten Natuna				1	197,783,349	114,400,054		
JUMLAH									572,001,000	572,000,635		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03.	Sekretariat Daerah								1,167,481,600	1,223,924,888		
03.03.	BAGIAN ORGANISASI								1,167,481,600	1,223,924,888		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								1,167,481,600	1,223,924,888		
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								1,167,481,600	1,223,924,888		
4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KELEMBAGAAN	70			1,167,481,600	1,223,924,888		
4.01.01.2.13.	Penataan Organisasi						Persentase Perangkat Daerah yang tata kelolanya baik	100	770,181,600	775,903,244		
4.01.01.2.13.01.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	384,073,182	409,434,004		Sekretariat Daerah
	Pengoordinasian Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Kabupaten Natuna				47	384,073,182	409,434,004		
4.01.01.2.13.03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	235,000,000	215,360,822		Sekretariat Daerah
	Belanja Display Monitor LCD			Kecamatan Bunguran Timur				1	25,000,000	0		
	Belanja Modal Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				1	20,000,000	0		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan laptop			Kabupaten Natuna				2	40,000,000	40,000,000		
	Pengoordinasian Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Kabupaten Natuna				37	150,000,000	175,360,822		
4.01.01.213.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	151,108,418	151,108,418		Sekretariat Daerah
	Pengoordinasian Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			Kabupaten Natuna				47	151,108,418	151,108,418		
4.01.01.213.	Penataan Organisasi						Persentase Perangkat Daerah Yang Tata Laksananya Baik	100	397,300,000	448,021,644		
4.01.01.213.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	247,300,000	272,660,822		Sekretariat Daerah
	Pelaksana Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Kabupaten Natuna				73	247,300,000	272,660,822		
4.01.01.213.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	150,000,000	175,360,822		Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Kabupaten Natuna				45	150,000,000	175,360,822		
JUMLAH									1,167,481,600	1,223,924,888		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03.	Sekretariat Daerah								983,000,000	1,728,000,000		
03.09.	<u>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</u>								983,000,000	1,728,000,000		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								983,000,000	1,728,000,000		
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								983,000,000	1,728,000,000		
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA	59			983,000,000	1,728,000,000		
4.01.03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	3.7	521,000,000	1,293,000,000		
4.01.03.2.03.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	121,000,000	93,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Alat Pendingin (AC)			Kecamatan Bunguran Timur				2	16,000,000	8,000,000		
	Belanja Modal Display Monitor LCD			Kecamatan Bunguran Timur				1	20,000,000	20,000,000		
	Belanja Modal Komputer PC All In One			Kecamatan Bunguran Timur				3	60,000,000	60,000,000		
	Belanja Modal Printer			Kecamatan Bunguran Timur				5	25,000,000	5,000,000		
4.01.03.2.03.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						Jumlah Orang yang Mengikuti	30	400,000,000	1,200,000,000		Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			Kabupaten Natuna				50	400,000,000	400,000,000		
	Pelaksanaan Bimtek PBJ			Kabupaten Natuna				50	0	400,000,000		
	Pelaksanaan Bimtek PBJ			Kabupaten Natuna				50	0	400,000,000		
4.01.03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	16	462,000,000	435,000,000		
4.01.03.2.03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	462,000,000	435,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Komputer			Kecamatan Bunguran Timur				2	40,000,000	20,000,000		
	Belanja Modal Mesin Scanner			Kecamatan Bunguran Timur				1	12,000,000	10,000,000		
	Belanja Modal Printer			Kecamatan Bunguran Timur				2	10,000,000	5,000,000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Kabupaten Natuna				4	400,000,000	400,000,000		
JUMLAH									983,000,000	1,728,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03.	Sekretariat Daerah								1,745,000,000	16,517,083,954		
03.08.	<u>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</u>								1,745,000,000	16,517,083,954		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								1,745,000,000	16,517,083,954		
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								1,745,000,000	16,517,083,954		
4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	100			1,745,000,000	16,517,083,954		
4.01.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						Persentase Agenda Protokol Terencana yang terfasilitasi	88	1,745,000,000	16,517,083,954		
4.01.01.2.14.01.	Fasilitasi Keprotokolan						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	1,180,000,000	6,957,627,675		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Laptop			Kabupaten Natuna				12	50,000,000	1,361,525,535		
	Belanja Modal Printer			Kabupaten Natuna				12	80,000,000	1,361,525,535		
	Belanja souvenir			Kabupaten Natuna				12	200,000,000	1,361,525,535		
	Pakaian Dinas Lapangan			Kabupaten Natuna				12	200,000,000	1,361,525,535		
	Revarasi Ruangan Kantor			Kabupaten Natuna				12	500,000,000	1,361,525,535		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Revarasi Ruangan Kantor			Kabupaten Natuna				12	150,000,000	150,000,000		
4.01.01.2.14.02.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	220,000,000	1,628,845,836		Sekretariat Daerah
	Belanja Alat Perekam dan Headphone			Kabupaten Natuna				12	100,000,000	407,211,459		
	Belanja laptop			Kabupaten Natuna				12	50,000,000	407,211,459		
	Belanja Modal Komputer			Kabupaten Natuna				12	40,000,000	407,211,459		
	Belanja printer			Kabupaten Natuna				12	30,000,000	407,211,459		
4.01.01.2.14.03.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	345,000,000	7,930,610,443		Sekretariat Daerah
	Belanja HP Iphone			Kabupaten Natuna				12	25,000,000	1,132,944,349		
	Belanja Hp OPPO			Kabupaten Natuna				12	20,000,000	1,132,944,349		
	Belanja Kamera			Kabupaten Natuna				12	80,000,000	1,132,944,349		
	Belanja Lensa Kamera			Kabupaten Natuna				12	55,000,000	1,132,944,349		
	Belanja Modal Laptop			Kabupaten Natuna				12	75,000,000	1,132,944,349		
	Belanja Printer			Kabupaten Natuna				12	30,000,000	1,132,944,349		
	Belanja TV Smart			Kabupaten Natuna				12	60,000,000	1,132,944,349		
JUMLAH									1,745,000,000	16,517,083,954		

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03.	Sekretariat Daerah								49,665,659,462	51,355,473,122		
03.07.	<u>BAGIAN UMUM</u>								49,665,659,462	51,355,473,122		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								49,665,659,462	51,355,473,122		
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								49,665,659,462	51,355,473,122		
4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90			49,665,659,462	51,355,473,122		
4.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	19,669,441,893	24,325,148,587		
4.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	19,669,441,893	24,325,148,587		Sekretariat Daerah
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Bunguran Timur				150	19,669,441,893	24,325,148,587		
4.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	55	147,009,364	142,500,000		
4.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	147,009,364	142,500,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Pakaian Adat Daerah KDH WKDH SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				36	5,535,000	7,500,000		
	Belanja Pakaian Batik Tradisional KDH WKDH SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				3	4,800,000	7,500,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) KDH/KWDH/SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				6	10,500,000	7,500,000		
	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) KDH/WKDH/SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				2	9,600,000	7,500,000		
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) KDH WKDH SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				5	10,000,000	7,500,000		
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Lengan Panjang			Kecamatan Bunguran Timur				5	11,000,000	7,500,000		
	Belanja Pakaian Sipil Lengkap KDH WKDH SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				3	14,400,000	7,500,000		
	Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Kecamatan Bunguran Timur				6	81,174,364	90,000,000		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	6,393,716,179	5,057,164,249		
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	730,000,000	725,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja alat bahan komponen listrik atau penerangan bangunan kantor, gedung sri sindit, lampu jalan kantor bupati.			Kecamatan Bunguran Timur				6	305,000,000	300,000,000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kecamatan Bunguran Timur				12	425,000,000	425,000,000		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	5	447,664,249	292,664,249		Sekretariat Daerah
	Belanja Alat Tulis Kantor			Kecamatan Bunguran Timur				1	180,000,000	100,000,000		
	PENGADAAN PANGGUNG TENDA DESA KELANGA			Desa Kelanga				2	75,000,000	0		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan Peralatan dan Perengkapan Kantor			Kabupaten Natuna				5	192,664,249	192,664,249		
4.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	880,000,000	60,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Bahan Bahan Kebersihan gedung kantor Bupati, gedung sri srintit, gedung wanita,			Kecamatan Bunguran Timur				3	80,000,000	30,000,000		
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Jasa Kebersihan)			Kecamatan Bunguran Timur				1	800,000,000	30,000,000		
4.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14	479,757,000	198,500,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Cetak Kalender, cetak buku agenda, cetak kertas lambang garuda, cetak map Bupati, Map Bagian, Cetak amplop, cetak buku disposisi, cetak cendra mata, cetak foto KDH WKDH			Kecamatan Bunguran Timur				9	479,757,000	198,500,000		
4.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	3,856,294,930	3,781,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Bimbingan Teknis			Kecamatan Bunguran Timur				10	130,000,000	120,000,000		
	Belanja Makan Minum Rapat			Kecamatan Bunguran Timur				1000	222,000,000	200,000,000		
	Makan Minum Jamuan tamu dan tamu pimpinan			Kabupaten Natuna				10	1,461,000,000	1,461,000,000		
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar daerah dan Dalam Daerah)			Kabupaten Natuna				301	2,043,294,930	2,000,000,000		
4.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80	5,349,200,000	3,525,000,000		
4.01.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	4	1,000,000,000	1,000,000,000		Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Jabatan yang Disediakan					
	Belanja modal Kendaraan dinas roda empat Asisten			Kecamatan Bunguran Timur				1	300,000,000	300,000,000		
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda Empat KDH/WKDH			Kecamatan Bunguran Timur				1	700,000,000	700,000,000		
4 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	745,000,000	745,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja modal bus mini untuk tamu daerah			Kecamatan Bunguran Timur				1	300,000,000	300,000,000		
	Belanja modal kendaraan dinas roda dua			Kabupaten Natuna				1	20,000,000	20,000,000		
	Belanja Modal Mobil Truck			Kecamatan Bunguran Timur				1	250,000,000	250,000,000		
	Kendaraan dinas operasional Pick Up			Kabupaten Natuna				1	175,000,000	175,000,000		
4 01 01 2 07 05	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	937,000,000	250,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Lemari Arisp Besi			Kecamatan Bunguran Timur				7	52,000,000	50,000,000		
	Belanja Modal Kursi rapat			Kecamatan Bunguran Timur				500	375,000,000	50,000,000		
	Partisi Meja Kantor			Kecamatan Bunguran Timur				15	225,000,000	50,000,000		
	Pengadaan Kursi kerja staf			Kecamatan Bunguran Timur				50	175,000,000	50,000,000		
	Pengadaan Kursi Plastik			Kecamatan Bunguran Timur				500	110,000,000	50,000,000		
4 01 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	1,496,500,000	505,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Alat Pendingin (AC Split)			Kecamatan Bunguran Timur				10	100,000,000	50,000,000		
	Belanja modal alat perekam CCTV			Kecamatan Bunguran Timur				1	50,000,000	50,000,000		
	Belanja modal penghancur kertas			Kecamatan Bunguran Timur				5	35,000,000	35,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan Komputer PC ALL IN ONE			Kecamatan Bunguran Timur				10	235,000,000	50,000,000		
	Pengadaan Kursi Plastik Masyarakat Kp. Air Raya			Kelurahan Serasan				1	100,000,000	100,000,000		
	Pengadaan Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				10	250,000,000	50,000,000		
	Pengadaan Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				10	250,000,000	50,000,000		
	Pengadaan Mesin Scanner			Kecamatan Bunguran Timur				10	80,000,000	50,000,000		
	Pengadaan Printer			Kecamatan Bunguran Timur				10	85,000,000	50,000,000		
	Pengadaan TV Display + Standing Braket			Kecamatan Bunguran Timur				14	311,500,000	20,000,000		
4.01.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	730,000,000	500,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja modal rempel tenda			Kecamatan Bunguran Timur				1	75,000,000	50,000,000		
	Pengadaan Pelapon tenda			Kecamatan Bunguran Timur				1	40,000,000	50,000,000		
	Pengadaan rampel dan pelapon Tenda Kerucut			Kecamatan Bunguran Timur				4	320,000,000	150,000,000		
	Pengadaan rampel Gedung Kantor Bupati (Non Tiang)			Kecamatan Bunguran Timur				1	40,000,000	50,000,000		
	Pengadaan Rempel Gedung Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				8	40,000,000	50,000,000		
	Pengadaan sarung kursi			Kecamatan Bunguran Timur				500	100,000,000	50,000,000		
	Pengadaan terpal tenda			Kecamatan Bunguran Timur				1	50,000,000	50,000,000		
	Pengandaan rampel gedung dan tiang Gerdung Sri Sringit			Kecamatan Bunguran Timur				2	65,000,000	50,000,000		
4.01.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	440,700,000	525,000,000		Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dan jasa tagihan listrik dan air			Kabupaten Natuna				2	115,700,000	150,000,000		
	Belanja Sewa Rumah Singgah			Kabupaten Natuna				1	250,000,000	300,000,000		
	Pengadaan Partisi atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Bunguran Timur				1	75,000,000	75,000,000		
4.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100	6,254,550,286	6,244,550,286		
4.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	120,000,000	110,000,000		Sekretariat Daerah
	Benda pos materai			Kecamatan Bunguran Timur				1	60,000,000	50,000,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Natuna				12	60,000,000	60,000,000		
4.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1,925,000,000	1,925,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Telepon			Kecamatan Bunguran Timur				1	55,000,000	55,000,000		
	Tagihan Air			Kecamatan Bunguran Timur				1	170,000,000	170,000,000		
	Tagihan Listrik			Kecamatan Bunguran Timur				1	1,700,000,000	1,700,000,000		
4.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4,209,550,286	4,209,550,286		Sekretariat Daerah
	Bayar Premi Asuransi Kecelakaan Kerja			Kecamatan Bunguran Timur				1	12,976,200	12,976,200		
	Belanja Jasa Tenaga Kontrak Pelayanan Umum			Kecamatan Bunguran Timur				552	772,800,000	772,800,000		
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga			Kecamatan Bunguran Timur				1	280,000,000	280,000,000		
	Belanja tenaga pelayanan petugas rumah singgah Batam			Kabupaten Natuna				12	30,000,000	30,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Honorium supir KDH/WKDH di Ranai, Batam dan Jakarta			Kabupaten Natuna				72	180,000,000	180,000,000		
	Jasa tenaga administrasi (Tenaga Pendamping pengelolaan, staf PPTK, PTT)			Kecamatan Bunguran Timur				1	2,701,280,000	2,701,280,000		
	Premi Asuransi kematian			Kecamatan Bunguran Timur				1	16,221,606	16,221,606		
	Premi Asuransi Kesehatan			Kecamatan Bunguran Timur				1	216,272,480	216,272,480		
4 01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	6,128,660,000	6,389,660,000		
4 01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	4,788,000,000	5,094,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Air Tawra MV Indra Perkasa			Kecamatan Bunguran Timur				1	5,000,000	5,000,000		
	Belanja Alat Kebersihan MV Indra Perkasa			Kecamatan Bunguran Timur				1	10,000,000	10,000,000		
	Belanja Bahan Bakar dan pelumas			Kabupaten Natuna				1	2,330,000,000	2,330,000,000		
	Belanja Jasa Operator Kapal			Kecamatan Bunguran Timur				120	522,000,000	522,000,000		
	Belanja Modal perlengkapan Kapal MV IP			Kabupaten Natuna				26	204,000,000	510,000,000		
	Belanja pajak, clerance kendaraan dinas dan mv indra perkasa			Kabupaten Natuna				1	150,000,000	150,000,000		
	Belanja Paket Pengiriman (Air/Minyak)			Kecamatan Bunguran Timur				1	37,000,000	37,000,000		
	Belanja Pemeliharaan alat angkutan apung bermotor			Kabupaten Natuna				1	500,000,000	500,000,000		
	Belanja pemeliharaan alat keselamatan Kapal MV IP			Kabupaten Natuna				1	60,000,000	60,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin			Kabupaten Natuna				1	300,000,000	300,000,000		
	Belanja suku cadang Kendaraan dinas dan MV Indra Perkasa			Kecamatan Bunguran Timur				1	670,000,000	670,000,000		
4.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	642,100,000	602,100,000		Sekretariat Daerah
	Belanja bahan bakar dan pelumas			Kecamatan Bunguran Timur				1	315,000,000	275,000,000		
	Belanja jasa teknisi mekanik dan listrik			Kecamatan Bunguran Timur				12	36,000,000	36,000,000		
	Belanja Pemeliharaan mesin genset			Kecamatan Bunguran Timur				1	100,000,000	100,000,000		
	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Gedung Daerah			Kecamatan Bunguran Timur				1	50,000,000	50,000,000		
	Isi Ulang Gas LPG 12 Kg			Kecamatan Bunguran Timur				100	27,500,000	27,500,000		
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum			Kecamatan Bunguran Timur				24	33,600,000	33,600,000		
	Pemeliharaan AC			Kecamatan Bunguran Timur				1	80,000,000	80,000,000		
4.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	698,560,000	693,560,000		Sekretariat Daerah
	Belanja pemeliharaaa gedung kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				1	81,740,000	81,740,000		
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan taman Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				1	30,000,000	25,000,000		
	Pemeliharaaa gedung sri srindit			Kecamatan Bunguran Timur				1	70,028,000	70,028,000		
	Pemeliharaan Gedung Dekrasnasda			Kecamatan Bunguran Timur				1	50,020,000	50,020,000		
	Pemeliharaan Gedung Wanita			Kecamatan Bunguran Timur				1	50,508,000	50,508,000		
	Pemeliharaan Pagar Belakang Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				143	34,892,000	34,892,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemeliharaan taman Gedung Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				144	35,136,000	35,136,000		
	Pengecatan dinding tebing dan tulisan Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				205	50,020,000	50,020,000		
	Pengecatan Gedung Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				1	195,200,000	195,200,000		
	Pengecatan Landmark Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				145	35,380,000	35,380,000		
	Pengecatan Musholiah Bukit Arai			Kecamatan Bunguran Timur				1	50,508,000	50,508,000		
	Peraikan Saluran Air			Kecamatan Bunguran Timur				62	15,128,000	15,128,000		
4.01.01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan	100	5,723,081,740	5,671,450,000		
4.01.01.2.11.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	1,717,466,000	1,717,466,000		Sekretariat Daerah
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kecamatan Bunguran Timur				2	1,717,466,000	1,717,466,000		
4.01.01.2.11.04.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	4,005,615,740	3,953,984,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Jasa akomodasi Tamu			Kabupaten Natuna				1	200,000,000	200,000,000		
	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu kunjungan kerja /inspeksi KDH WKDH			Kabupaten Natuna				7	700,000,000	700,000,000		
	Belanja makan dan minum jamuan tamu peningkatan operasional teknis Perangkat Daerah			Kabupaten Natuna				8	700,000,000	700,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja makan dan minum tahanan			Kabupaten Natuna				1	249,984,000	249,984,000		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Kabupaten Natuna				56	863,109,040	800,000,000		
	Belanja sewa kendaraan air kegiatan kunjungan KDH WKDH			Kabupaten Natuna				12	54,000,000	54,000,000		
	Honorium Tim Penasehat Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				600	900,000,000	900,000,000		
	Perjalanan dinas luar daerah pihak ketiga			Kabupaten Natuna				30	338,522,700	350,000,000		
JUMLAH									49,665,659,462	51,355,473,122		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03.	Sekretariat Daerah								1,189,324,851	1,189,324,851		
03.01.	<u>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</u>								1,189,324,851	1,189,324,851		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								1,189,324,851	1,189,324,851		
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								1,189,324,851	1,189,324,851		
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PENINGKATAN NILAI LPPD	100			1,189,324,851	1,189,324,851		
4.01.02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan						Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	90	1,189,324,851	1,189,324,851		
4.01.02.2.01.01.	Penataan Administrasi Pemerintahan						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	736,850,945	736,850,945		Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan			Kabupaten Natuna				1	736,850,945	736,850,945		
4.01.02.2.01.02.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	392,473,906	392,473,906		Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan			Kabupaten Natuna				1	392,473,906	392,473,906		
4.01.02.2.01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	1	60,000,000	60,000,000		Sekretariat Daerah

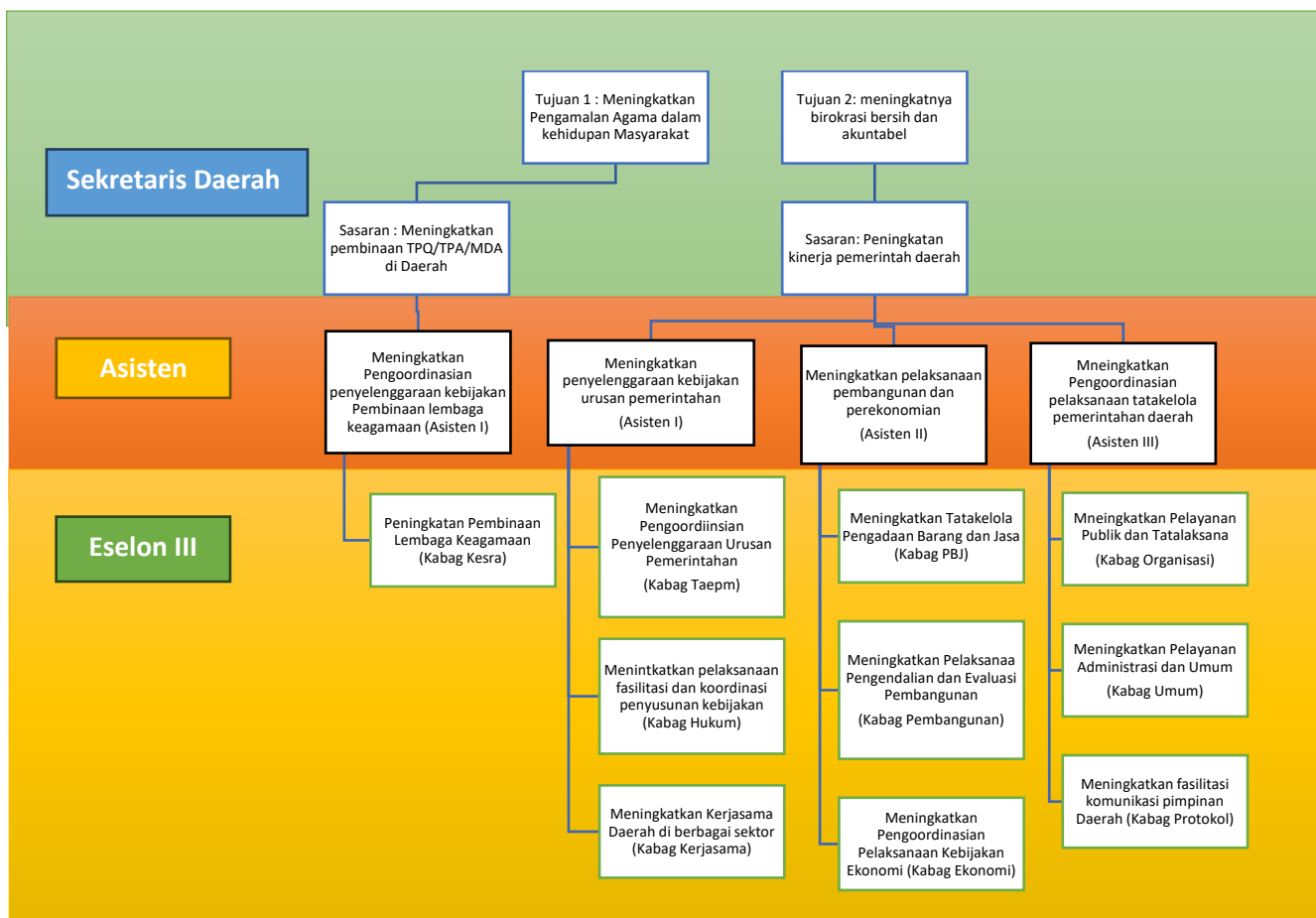
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Otonomi Daerah					
	Belanja Modal Computer PC			Kecamatan Bunguran Timur				1	35,000,000	35,000,000		
	Belanja Modal Display Monitor LCD			Kecamatan Bunguran Timur				1	25,000,000	25,000,000		
JUMLAH									1,189,324,851	1,189,324,851		

4.2. Cascading dan Crosscutting

Cascading dan crosscutting merupakan dua konsep penting dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Keduanya saling berkaitan dan bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang lebih luas.

Cascading merupakan proses penjabaran tujuan strategis dari tingkat atas (visi, misi, tujuan) ke tingkat yang lebih operasional (program dan kegiatan). Dengan kata lain, cascading adalah proses menerjemahkan tujuan besar menjadi tindakan nyata di lapangan.

Cascading Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna



Crosscutting merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai isu tematik atau lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Misalnya, isu gender, lingkungan hidup, atau pemberdayaan masyarakat dapat menjadi crosscutting issue yang perlu diperhatikan dalam setiap program. Untuk Sekretariat Daerah yang menjadi crosscutting isu adalah Pelaksanaan Birokrasi yang bersih dan akuntabel yang terintegrasai ke dalam tiga program yang ada di Sekretariat Daerah yaitu Porgram Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Porgram Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten. Untuk lebih jelas bagaimana crosscutting isu dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel Crosscutting Issu Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

Tujuan Utama	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Strategi/arah kebijakan	Unit Kolaborasi
Meningkatnya Birorkasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Good Government)	Meningkatnya Nilai SAKIP Daerah	Melakukan fasilitasi peningkatan kinerja Perangkat Daerah, reformasi birokrasi, fasilitasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunna, penyerapan anggaran pembangunna, pengukuran kinerja dan penunjang	Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pembangunan, Bappeda
		Meningkatnya Perolehan nilai LPPD	Penguatan dan peningkatan kualitas perencanaan daerah, peningkatan kualitas pelaksanaan, Peningkatan keterbukaan dan partisipasi publik, peningkatan kualita data dan informasi, penguatan koordinasi dan kolaborasi	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian organisasi, Bagian Administrasi Pembnagunan, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, Bagian Kerjasama, Bagian PBJ, OPD Pengampu indikator LPPD, Bappeda.
		Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi berbass online, keterbukaan informasi publik, membangun pusat pengaduan online, Peningatan Kapasitas dan kompetensi SDM bidang Pelayanan,	Bagian Organisasi, Bagan Protokol, Bagian Umum, Ombudsman,
Meningkatnya Pengmalan Nilai Agama di Tengah Masyarakat	Meningkatkan Pembinaan terhadap lembaga keagamaan (Rumah Ibadah, TPQ, MDA)	Persentase Pembinaan terhadap rumah ibadah (Masjid, TPQ dan MDA)	Pemberian bantuan dana operasional bagi lembaga keagamaan, dana bantuan guru ngaji, Pelatihan manajemen dan tata kelola rumah ibadah/TPQ/TPA/MDA, Lomba TPQ Berprestasi, monitoring dan evaluasi kinerja TPQ/TPA/MDA	Bagian Kesejahteraan rakyat, Lembaga Keagamaan lainnya.

BAB 5. PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025, merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025. Dalam penutup dokumen Rencana Kerja tahun 2025 ini, kami menegaskan komitmen untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan sebaik-baiknya. Rencana ini merupakan hasil dari proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan rencana kerja ini akan menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dan stakeholder lainnya sangat diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan. Dengan semangat kebersamaan, kami yakin bahwa semua tantangan dapat dihadapi dan diatasi secara efektif.

Selanjutnya, kami berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Natuna dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan rencana kerja ini. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keberhasilan rencana kerja ini sangat bergantung pada dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

- 1) Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 baik dalam lingkup program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 2) Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan bersama.
- 3) Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini. Semoga rencana ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Natuna